



DRAF

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : / /DISKOMINFOTIK/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 Nomor 02 Nomor Registrasi 8 tahun 2017 tambahan lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 146);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat dalam memberikan Data dan Informasi kepada publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN :

1. Komisi Informasi Pusat di Jakarta
2. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. Kepala OPD Lingkup Kabupaten Lombok Barat masing-masing di tempat;

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat
 Nomor : / /DISKOMINFOTIK/2018
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN					
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT					
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
INFORMASI BIDANG PEMERINTAHAN					
1	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
2	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya SP2LP(Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

3	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Petimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
5	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43.	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
44.	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Bali tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penertbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45.	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

5	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi ketahanan ekonomi nasional; - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
8	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, maupun aparatur pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Mengamankan proses seleksi
46.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

INFORMASI BIDANG KEPENDUDUKAN

47	Data Pribadi Penduduk	- Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
48	Akta, wasiat	Pasal 17 huruf l UU No 14/2008	Tdk terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak2 tertentu	Melindungi data pribadi yg bersifat rahasia
6.	Data Pribadi Penduduk	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.
INFORMASI BIDANG KEPEGAWAIAN					
7.	Rincian hasil uji kompetensi PNS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

9.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11.	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
13.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14.	Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadiseorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghamb at kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

16.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17.	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18.	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19.	Hasil Identifikasi potensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21.	Soal Tes CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

22.	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
23.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
24.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
25.	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26.	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

28.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Biodata elektronik & non elektronik PNS (data base)	Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 ttg KIP	Tdk terbatas	Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
40	Daftar Penilaian Prestaasi Kereja/DP3 PNS	1.Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; 2.UU No.43/1999 ttg kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yg bersifat rahasia

41	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; • Proses Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman: <ul style="list-style-type: none"> - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS; - Proses Keputusan pemberhentian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. Pasal 17 huruf h UU 14/2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang Sampai diterbitkan Keputusan Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap rahasia pribadi; 2. Mengungkap data pribadi/PNS yg bersifat rahasia Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia 	<p>Melindungi data pribadi Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia</p>
----	---	---	--	---	--

42					
43	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dlm jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat	1.Pasal 17 huruf I UU 14/2008 2.UU No. 43/99 ttg Kepegawaian	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati	Merugikan proses penyusunan kebijakan/mengham bat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

44	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 huruf I UU 14/2008	Tdk terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia
45	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf I UU No 14/2008	Sampai dgn penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak2 tertentu	Mencegah kolusi
46	Soal tes CPNS	Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008	Sampai dgn pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

29.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

INFORMASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

32.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNLSH	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
33.	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
34.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum

INFORMASI BIDANG PEREKONOMIAN

35.	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
-----	--	--	---	--	---

36.	Rencana alokasi bersubsidi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37.	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

INFORMASI BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI

47.	Berita sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49.	Perangkat khusus persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50.	Kunci sistem sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52.	Jalur komunikasi VVIP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54.	Berita/Radiogram rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

INFORMASI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
55.	Dokumen ijin usaha Pertambangan (IUP)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
56.	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	Sampai dengan terpilihnya	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57.	Data Teknis Potensi Air Tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
INFORMASI BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
58.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59.	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60.	Hasil Test Kemampuan fisik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
49	Dokumen yg berkaitan dgn penyelenggaraan Ujian Nas & Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : 1) master naskah soal;	1.UU No. 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional; 2.Pasal 17 huruf j UU No. 14/2008	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen

	2) naskah soal; 3) proses pemindaian/scanning LJK; 4) scoring; 5) pencetakan & nama pencetakan				
	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	Pasal 17 huruf I UU 14/2008	Sampai dengan pengisian formasi yang ada	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia
50	Hasil Test kemampuan fisik	Pasal 17 huruf hUU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
X	Informasi Kesehatan	-			

51	Rahasia Kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP; - UU No. 36/2009 ttg Kesehatan; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
74.	Identitas Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
75.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

77.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	Melindungi rahasia pribadi pasien
80.	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
81.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

52	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; - Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Pasal 98 UU No. 36 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
		<p>Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 			
53	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
54	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

55	Hasil cek kesehatan & uji fisik atlet	1.UU No. 3/2005 ttg Keolahragaan; 2.Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai
61.	Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
INFORMASI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
62.	Dokumen Perijinan (41 jenis izin) beserta lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63.	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64.	Data Debitur dana bergulir	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
65.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan

66.	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
INFORMASI BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN`					
67.	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama diperkirakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68.	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/ illegal logging/illegal trading yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
69.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)
70.	Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

71.	Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf j - UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
72.	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
73.	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
INFORMASI BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
82.	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
83.	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
84.	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan

85.	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (menggangu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
86.	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga menggangu proses rehabilitasi/penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
87.	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
88.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
56	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yg bersifat rahasia & mempermudah penanganan permasalahan yg dihadapi

57	Hasil wawancara/diagnosa/bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yg bersifat rahasia
58	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yg bersifat rahasia
59	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	1.UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan 2.Pasal 17 huruf l dan huruf j UU No. 14/2008	Sampai dgn Penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Menimbulkan permasalahan/polemik dlm pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dpt menetapkan Kebijakan Sesuai normatif
60	Biodata tenaga kerja asing	1.UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan; 2.Permennaker No.02/2008 ttg Tata Cara Penggunaan Tenaga asing.	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yg sifatnya pribadi & rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA

61	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
62	Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
89.	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
INFORMASI BIDANG KOMINFO					
90.	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data

91.	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses
92.	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
93.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer

INFORMASI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA

94.	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Sampai dengan selesai dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Sampai dengan selesainya proses penanganan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
96.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Sampai selesai kasusnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi

97.	Informasi data pribadi penegak perda	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i 	Sampai ada persetujuan tertulis Dari Penegak perda yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
98.	Berita Acara Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i 	Selama proses pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data- data pribadi obyek terperiksa
31.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c 	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
3	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi

4	Internet protokol/IP Address Private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management Database	1.Pasal 17 huruf I UU no. 14/2008 2.Pasal 30 s/d pasal 37 UU no. 11/2008 ttg ITE	Tdk terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamank an perangkat serta data
INFORMASI HUKUM					
9	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008	Tdk terbatas	Pelanggaran HAM (terkait azas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
10	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan	- Pasal 70 ayat (2)UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981; - Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	1 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
11	<ul style="list-style-type: none"> Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban; 	<ul style="list-style-type: none"> UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Selama masih berlaku; Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	<ol style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum; Mengungkap rahasia pribadi; 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan Hukum; Melindungi data pribadi

12	Rencana penertiban/penindakan & penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
13	Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf a angka 1 uu No. 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14/2008 ttg KIP	Sampai selesainya kasus Tidak terbatas	Menggagalkan rencana operasi dan penertiban Mengungkap rahasia pribadi	Kelancaran proses penegakan hukum Melindungi data pribadi
14	Proses penyelidikan & penyidikan yg ditangani oleh PPNS & rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 UU No. 14/2008; - UU No. 32/2009 ttg Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
15	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008	Sampai dgn diserahkan kpd Penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
16	Rencana operasi pengawasan angkutan barang & penumpang	1.UU No.14/2008 2.UU No. 22/2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu Badan Publik dlm mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
17	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

18	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging /illegal trading yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar dan penyidikan
----	--	---	-------------------------------------	--	--

INFORMASI KESEKRETARIATAN

19	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersifat tertutup, meliputi : -Laporan singkat; -Catatan rapat; -risalah; -slide presentasi dan/atau -rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
----	---	--	---	--	---

20	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
----	--	--	---	--	---

INFORMASI KEUANGAN DAN ASSET

21	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten(Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
22	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten (Sebelum disampaikan dan dibahas DPRD);	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
23	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan;	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
24	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	- Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan
25	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	- Pasal 17b UU No 14/2008 ttg UU KIP; - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 391/KPTS/M/2011	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan
26	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	- Pasal 17b UU No 14/2008 ttg UU KIP; - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 391/KPTS/M/2011	Sampai dengan penyerahan ke dua	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

27	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17b UU No 14/2008 ttg UU KIP; - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 391/KPTS/M/2011 	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
28	Dokumen pelaksanaan pekerjaan: Konsultasi(perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi) antara lain produk laporan;	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 15/2004 ttg Perbendaharaan Negara; - UU No 17/2004 ttg Keuangan Negara; Kepmen PU No 391/KPTS/14/2011 ttg Penetapan Klasifikasi 	Sampai proses audit selesai	Pekerjaan masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
29	Dokumen kerjasama Pemerintah Kabupaten Klaten dan swasta (investasi, eksplorasi dan kerjasama lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14/2008 tentang KIP; 	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kerjasama
30	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota,	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
31	Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 4/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

32	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 4/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
33	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.15/2004 ttg Perbendaharaan Negara; - UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara 	Selama masih berlaku	Pelanggaran disiplin PNS dlm membocorkan rahasia negara sehingga dpt menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
34	Database Objek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 	Sampai ada perintah dari enegak ukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan -penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database onjek pajak dan retribusi
35	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf hUU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
36	Sistem Pengelolaan Keuangan & Database Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pasal 17 huruf e & huruf j UU No. 14/2008 ttg KIP; 2.UU no. 11/2008 ttg ITE 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

INFORMASI INSPEKTORAT

37	<ul style="list-style-type: none">• Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen;• Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA);• Dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat;• Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia;	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;- Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;- UU No.15/2004 ttg Perbendaharaan Negara; UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara	Selama masih Berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
----	--	---	----------------------	---	---

38	Proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 & pasal 17 huruf l UU No. 14/2008; 2. UU No. 32/2004 ttg PEMDA yg telah diubah dgn UU No. 12/2008 ttg Perubahan ke 2 UU No. 32/2004; 3. UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan & Tg Jawab Keuangan Negara` 4. UU No.1/2004 ttg Keuangan Negara; 5. PP No.79/2005 ttg Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 6. PP No. 60/2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. PP No. 53/2010 ttg Peraturan Disiplin PNS; 8. Permendagri No.8/2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda; 9. Permendagri No.28/2007 ttg Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 10. Permen PAN no.04/2008 ttg Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. PermenPAN No.05/2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 12. Permendagri No. 47/2011 ttg Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kemdagri dan penyelenggaraan Pemda tahun 2012. 	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambatkan proses pemeriksaan; - Melanggar PP ttg batasan distribusi LHP; - Melanggar Peraturan Menpan ttg batasan distribusi LHP 	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.
----	---	--	--	--	---

INFORMASI PENDIDIKAN

xi	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM				
xii	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
63	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
64	Proses sertifikasi mutu & uji mutu yg dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	1. Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 2. UU No. 7/1996 ttg Pangan 3. UU No. 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen 4. UU No. 69/1999 ttg Label & Iklan Pangan;	Sampai selesai penelitian	Dapat disalah gunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi

65	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/ perbaikan mutu
66	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
67	Dokumen Perijinan	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/[perusahaan yang bersifat rahasia
	Informasi Pertanian				
68	Proses usulan penilaian usaha	1.Pasal 13 ayat (2), pasal 14. pasal 17 ayat (2), pasal 60	Terbatas sampai dengan	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan
XIII	Infomasi Kekayaan Alam				
69	Hasil eksplorasi detail (koordinat Potensi Bahan	Pasal 17 huruf d & huruf h UU No.14/2008	Tidak terbatas	- Mengungkap kekayaan alam	- Mengamankan pengelolaan/managem en Potensi SDA;
70	Laporan studi kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas	1.Pasal 17 huruf b dan huruf h UU	Tidak terbatas	- Membuka rahasia perusahaan;	- Melindungi Kerahasiaan Perusahaan l(hak

71	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama potensi air tanah diperkirakan	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan
72	Wilayah izin usaha pertambangan	Pasal 17 huruf d UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam
73	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi,	1.Pasal 4 ayat (3) UU No. 27/2003 tng Panas	Tidak terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam
74	Hasil penelitian potensi sumber	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Sampai dinyatakan terbuka	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi/menjaga kekayaan alam
INFORMASI BIDANG KEUANGAN					
100.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan	Dapat mempengaruhi penataan siklus	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan
101.	Database Objek Pajak Dan Restribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40	Sampai ada perintah dari penegak	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan restribusi
105.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai	Menghindari konflik kepentingan, menjaga
104.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama proses pengadaan barang	Dapat menghambat proses penyusunan	Dapat menjamin obyektifitas
103.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang
102.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
106.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis	Mengungkap rahasia(data kekayaan)	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
108.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan
107.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat	Sampai dengan terbitnya laporan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan
INFORMASI BIDANG KEARSIFAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J;	Sampai ada persetujuan dari	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi

2.	Arsip Peta Foto Udara	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Selama didalamnya masih	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak
3	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang	Kerahasiaan lokasi terjaga
4.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan:	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;			

	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/keompok/perseorangan</p> <p>c. Data Informasi Pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. Data Kekayaan Alam yang dilindungi</p> <p>e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahaskan</p>		<p>Selama masih berlangsung penyelenggaraannya</p> <p>Selama Status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p>	<p>Menggangu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual</p> <p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat</p> <p>Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Menggangu proses pelaksanaan kegiatan</p>	<p>dalam proses penegakkan hukum</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Melindungi kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekawatiran masyarakat</p> <p>Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</p>
--	--	--	--	--	---

5.	Disposisi surat pimpinan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
----	--------------------------	---	--	--	---

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

